

✓ DPRD Banggai Bahas Temuan BPK

LUWUK – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulteng menemukan sembilan (9) temuan dan enam (6) rekomendasi. Hasil temuan BPK itu tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai.

Temuan BPK itu antara lain proyek bermasalah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, Rumah Sakit Umum (RSU) Luwuk, Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dan

beberapa instansi lain, yang harus ditindaklanjuti dan memerlukan penanganan serius oleh Pemkab Banggai.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai, H Suryanto, SH, Selasa (14/6) kemarin mengakui, temuan BPK telah dilimpahkan di lembaga legislatif untuk dibahas dan ditindaklanjuti. Bagaimana bentuk tindak lanjutnya, tergantung hasil pembahasan dan kajian anggota

● Baca DPRD Hal 15

Tak Perlu Dibuatkan Rekomendasi Hukumnya

■ DPRD ...

Sambungan dari hal...16

DPRD Kabupaten Banggai dalam melihat masalah tersebut.

“Kita belum bisa mengetahui bagaimana tindak lanjut dari temuan dan rekomendasi BPK terhadap persoalan yang terjadi pada masa kepemimpinan mantan Bupati Banggai, Ma'mun Amir. Karena, anggota legislatif (Aleg) sedang membahas temuan-temuan itu, untuk diporsikan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Anehnya, kata mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Banggai itu, proyek cekdam yang diduga bermasalah di Dinas Kehutanan

Kabupaten Banggai tidak masuk dalam temuan BPK. Padahal, di media massa bahkan keterangan Sekretaris Kabupaten Banggai selalu menyebutkan soal proyek cek dam di Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai masuk dalam temuan BPK.

Makanya, pembahasan DPRD Kabupaten Banggai terhadap hasil investigasi BPK belum bisa disimpulkan, menunggu hasil pembahasan para Aleg itu. Artinya, jika disimpulkan sebelum pembahasan LHP itu, akan menimbulkan penafsiran keliru, bahkan menyimpang dari hasil pembahasan nanti. “Untuk itu, kita tunggu hasil pembahasan saja,” jelasnya.

Sekcab Banggai H Musir A Madja, SH, MM mengatakan, LHP BPK terhadap pengelolaan anggaran di Kabupaten Banggai memberi penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Artinya, pengelolaan anggaran atau keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Temuan BPK yang sedang dibahas oleh DPRD Kabupaten Banggai hanya menyangkut administrasi saja, tidak ada yang perlu direkomendasikan ke ranah hukum. Karena, semua bisa dipertanggungjawabkan sesuai anggaran dan kondisi fisik pekerjaan yang ada. (rd)